



Pusat Analisis Keparlemenan
Badan Keahlian Setjen DPR RI

TARGET PENURUNAN KEMISKINAN EKSTRIM 0% PADA 2024

Mohammad Teja
Analisis Legislatif Ahli Muda
teja@dpr.go.id

Isu dan Permasalahan

Kemiskinan selalu menjadi isu sentral di setiap negara tidak terkecuali bagi Indonesia yang terus berusaha untuk selalu menargetkan penurunan angka kemiskinan di setiap tahunnya. Pertanyaan yang paling mendasar soal kemiskinan yakni: apakah ketidakmampuan pemenuhan seseorang atau kelompok orang dalam mencukupi kebutuhan dasarnya semakin tercukupi atau tidak? Jika lebih dalam lagi kemiskinan yang diderita masyarakat sudah sampai menyentuh hal fundamental selain makanan, air bersih, sanitasi, tempat tinggal, pendidikan, akses informasi dan layanan sosial. Target kemiskinan yang diharapkan menjadi kecil oleh pemerintah dilakukan dalam rapat terbatas kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal tahun 2024 yang dilaksanakan pada bulan Februari 2023 dengan menargetkan angka 0% untuk kemiskinan di Indonesia. Catatan Bank Dunia hingga pertengahan tahun 2023, menyebutkan bahwa pemerintah sudah mampu menurunkan angka kemiskinan sebesar 1,5 %. Sedangkan Badan Pusat Statistik (BPS) merilis pada September 2022, kemiskinan menurun sebesar 0,14% dibandingkan bulan yang sama di tahun yang lalu. Lebih lanjut, data yang dimiliki pemerintah pada Maret 2021 kemiskinan berada pada angka 2,14% dan menurun ke angka 2,04 di tahun 2022.

Untuk mendorong pencapaian target 0% pada kemiskinan ekstrim, usaha Pemerintah melalui Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) dapat dilakukan melalui 3 (tiga) cara, yaitu: *pertama*, pemberian bantuan sosial dan beberapa program sosial lain yang melekat. *Kedua*, melakukan pemberdayaan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat miskin ekstrim dalam memenuhi kebutuhan kesehariannya dan diharapkan masyarakat tersebut dapat memenuhi kebutuhannya secara berkelanjutan. *Ketiga*, memberikan akses seluas-luasnya kepada masyarakat miskin ekstrim terhadap pelayanan dasar.

Cara lain yang dinilai mampu mengurangi angka kemiskinan yang signifikan adalah dengan mengurangi angka pengangguran yang disebabkan oleh banyaknya masyarakat kehilangan pekerjaan. Bukannya tanpa sebab menurut catatan BPS, pada beberapa kasus, seperti di ibu kota negara misalnya, angka kemiskinan pada 2022 telah mencapai 4,69% atau sekitar 501 ribu jiwa. Hal ini secara tidak langsung berujung pada tingginya sumbangan angka kemiskinan itu sendiri. Langkah selanjutnya, adalah dengan memaksimalkan fungsi koordinator antar kementerian dan lembaga dalam memastikan kebijakan negara untuk mengurangi kemiskinan. Hal ini sebaiknya dilaksanakan secara terpadu dan konkrit serta melibatkan berbagai institusi terkait, termasuk pemerintah daerah serta masyarakat sipil juga masyarakat ekonomi sekaligus.

Pada akhir tahun 2023 ini, program-program untuk mengentaskan kemiskinan dikoordinasikan oleh Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia (Kemendagri PMK) seperti jaminan sosial, bantuan sosial, subsidi tepat sasaran, pelatihan kewirausahaan, beasiswa pendidikan, renovasi rumah tidak layak huni seperti perbaikan sanitasi dan lingkungan. Untuk memenuhi target pengurangan kemiskinan ekstrem 0%, pemerintah harus terus berupaya untuk memperbaiki penyaluran program agar tidak terjadi kesalahan inklusi dan kesalahan eksklusi.

Ini berarti bahwa setiap individu atau kelompok masyarakat miskin yang menerima bantuan program sudah sesuai dengan kondisi riil kriteria penerima program. Selanjutnya, perlu konvergensi program untuk memastikan bahwa jumlah bantuan yang diterima oleh masyarakat miskin ekstrim sudah sesuai dengan kebutuhannya, atau dengan kata lain mampu mengisi kedalaman kemiskinannya. Untuk memastikan mekanisme program dilakukan secara tepat, penting untuk selalu memperbaharui data penerima program, baik di daerah maupun di pusat agar program bisa terus menjangkau masyarakat miskin ekstrim.

Atensi DPR

Untuk mewujudkan target 0% kemiskinan ekstrim di Indonesia pada tahun 2024, DPR RI melalui Komisi VIII yang memiliki fungsi pengawasan, dalam rapat kerja bersama pemerintah dapat segera:

1. Mendorong kolaborasi dan kerjasama antara pemerintah pusat dan daerah untuk memastikan program bantuan tepat sasaran kepada masyarakat yang miskin ekstrim. *Up date* kesesuaian data sangat dibutuhkan guna tercapainya program yang tepat sasaran.
2. Meminta pemerintah untuk bersama-sama melakukan koordinasi antar kementerian terkait guna menemukan inovasi program-program yang lebih mengakselerasi pengurangan kemiskinan ekstrim guna pencapaian target 0%.
3. Melakukan pengawasan terhadap kementerian yang melaksanakan program pengentasan kemiskinan dengan melakukan koordinasi terhadap pencapaian dan penggunaan anggaran.

Sumber

kompas.com, 30 Juni dan 1 Juli 2023;
Media Indonesia, 2 Juli 2023;
news.republika.co.id, 1 Juni 2023.



Koordinator Sali Susiana
Polhukam Puteri Hikmawati
Ekkuinbang Sony Hendra P.
Kesra Hartini Retnaningsih



EDITOR

Polhukam
Simela Victor M.
Prayudi
Novianto M. Hantoro

LAYOUTER

Dewi Sendhikasari D.
Sita Hidriyah
Noverdi Puja S.

©PuslitBK2023

Ekkuinbang
Sri Nurhayati Q.
Sulasi Rongiyati
Rafika Sari
Eka Budiyantri
Dewi Wuryandani

Anih S. Suryani
Teddy Prasetyawan
T. Ade Surya
Masyithah Aulia A.
Yosephus Mainake

Kesra
Yulia Indahri
Trias Palupi K.
Luthvi Febryka Nola

Mohammad Teja
Nur Sholikhah P.S.
Fieka Nurul A.